



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 2, DESEMBER 2019

DAFTAR ISI

<i>PUSH AND PULL DRIVEN DEVELOPMENT: A PROPOSED DEVELOPMENT PARADIGM FOR WEST PAPUA, INDONESIA</i>	
Marlon Arthur Huwae dan Jaap Timmer	121-138
PEMBANGUNAN DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP MASYARAKAT KEPULAUAN KECIL TERLUAR DI PAPUA, INDONESIA	
Irin Oktafiani, I Wayan Suyadnya, dan Triyono	139-157
KEPUTUSAN MIGRASI PEKERJA MUDA KE KOTA SORONG, PAPUA BARAT	
Inayah Hidayati, Ade Latifa, Bayu Setiawan, dan Meirina Ayumi Malamassam	158-171
<i>MIGRANTS AS A PROMINENT ASPECT THREATENING LOCAL PAPUANS</i>	
Hatib Abdul Kadir	172-184
KONTROVERSI REALISASI KURSI AFIRMASI ANGGOTA LEGISLATIF DALAM OTONOMI KHUSUS PAPUA	
Ode Jamal dan Yan Dirk Wabiser	185-193
KRISIS PAPUA DALAM PERNYATAAN PEJABAT NEGARA DI MEDIA DARING: ANALISIS TEKSTUAL KONSTRUKSI WACANA KRITIS	
Fitria Widiyani Roosinda dan Ariyan Alfraita	194-204
MEMITOSKAN MITOS: KONSEP LEGALITAS KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT	
Adolof Ronsumbre dan Marlon Arthur Huwae	205-218
RINGKASAN DISERTASI	
<i>THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION (ISPO): OPPORTUNITY FOR INCLUSION OF PALM OIL SMALLHOLDER IN RIAU PROVINCE</i>	
Bondan Widayatmoko	219-228
TINJAUAN BUKU	
MEMAHAMI ETNOGRAFI RUANG DAN TEMPAT	
Ayu Nova Lissandhi	229-235
TINJAUAN BUKU	
DINAMIKA EKONOMI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PERTANIAN DAN PANGAN	
Eristya P. Irwanto	236-242



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 2, DESEMBER 2019

DAFTAR ISI

*PUSH AND PULL DRIVEN DEVELOPMENT: A PROPOSED DEVELOPMENT
PARADIGM FOR WEST PAPUA, INDONESIA*

Marlon Arthur Huwae dan Jaap Timmer121-138

PEMBANGUNAN DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP MASYARAKAT KEPULAUAN
KECIL TERLUAR DI PAPUA, INDONESIA

Irin Oktafiani, I Wayan Suyadnya, dan Triyono139-157

KEPUTUSAN MIGRASI PEKERJA MUDA KE KOTA SORONG, PAPUA BARAT

Inayah Hidayati, Ade Latifa, Bayu Setiawan, dan Meirina Ayumi Malamassam158-171

MIGRANTS AS A PROMINENT ASPECT THREATENING LOCAL PAPUANS

Hatib Abdul Kadir172-184

KONTROVERSI REALISASI KURSI AFIRMASI ANGGOTA LEGISLATIF DALAM OTONOMI
KHUSUS PAPUA

Ode Jamal dan Yan Dirk Wabiser185-193

KRISIS PAPUA DALAM PERNYATAAN PEJABAT NEGARA DI MEDIA DARING:
ANALISIS TEKSTUAL KONSTRUKSI WACANA KRITIS

Fitria Widiyani Roosinda dan Ariyan Alfraita194-204

MEMITOSKAN MITOS: KONSEP LEGALITAS KEPEMILIKAN TANAH ADAT
DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT

Adolof Ronsumbre dan Marlon Arthur Huwae205-218

RINGKASAN DISERTASI

*THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION (ISPO):
OPPORTUNITY FOR INCLUSION OF PALM OIL SMALLHOLDER IN RIAU PROVINCE*

Bondan Widiatmoko219-228

TINJAUAN BUKU

MEMAHAMI ETNOGRAFI RUANG DAN TEMPAT

Ayu Nova Lissandhi229-235

TINJAUAN BUKU

DINAMIKA EKONOMI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PERTANIAN DAN PANGAN

Eristya P. Irwanto236-242



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 2, DESEMBER 2019

DDC: 330.9**Marlon Arthur Huwae dan Jaap Timmer*****PUSH AND PULL DRIVEN DEVELOPMENT: SUATU USULAN PARADIGMA PEMBANGUNAN BAGI PAPUA BARAT, INDONESIA*****ABSTRAK**

Papua Barat adalah bagian timur Indonesia dengan sejarah panjang tata kelola dan skema pembangunan di bawah Belanda dan pemerintah Indonesia. Gagasan tentang keterbelahan dan keterlambatan jelas dalam pengembangan dan kebijakan yang diberikan oleh Belanda dan pemerintah Indonesia. Keadaan keterbelahan adalah preferensi orang Papua Barat untuk menjadi Papua Barat yang merdeka, dan atau orang Melanesia yang memuncak pada era Belanda atau menjadi bagian integral Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gagasan keterlambatan negara terkait dengan penerapan model dan kebijakan pembangunan dengan kesan tergesa-gesa yaitu otonomi khusus dan pemekaran di bawah Indonesia dan percepatan model dekolonisasi pembangunan di bawah Belanda. Maka penting untuk merumuskan model alternatif pembangunan dan paradigma yang disebut Push and Pull Driven Development untuk mengembangkan Papua Barat dengan lebih baik.

Kata kunci: *paradigma push and pull driven development, Papua Barat*

DDC: 307.7**Irin Oktafiani, I Wayan Suyadnya, dan Triyono****PEMBANGUNAN DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP MASYARAKAT KEPULAUAN KECIL TERLUAR DI PAPUA, INDONESIA****ABSTRAK**

Selama empat dekade terakhir, pengembangan pulau-pulau terluar sejak Orde Baru mengalami kegagalan. Tulisan ini membahas kondisi pembangunan di beberapa pulau kecil terluar di Indonesia Timur saat ini. Tulisan ini memperlihatkan kondisi terbatasnya akses terhadap pembangunan, yang kemudian membentuk strategi bertahan hidup bagi penduduk yang berada di beberapa pulau kecil terluar di Indonesia, yaitu Pulau Liki, Pulau Befondi, Pulau Fani, dan Pulau Brass-fanildo, yang semuanya masuk wilayah Papua. Dengan mempertimbangkan konsep yang diusulkan oleh Harry Jones, pembangunan seharusnya dapat mempertimbangkan tiga unsur dalam kesetaraan yaitu (1) peluang yang sama untuk hidup, (2) perhatian yang sama pada kebutuhan masyarakat, dan (3) meritokrasi. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam pada Ekspedisi Nusa Manggala 2018. Dengan menggunakan analisis deskriptif terhadap indikator Indeks Desa Membangun, hasil analisis ini menunjukkan bahwa tiga unsur kesetaraan pembangunan belum terasa di wilayah Indonesia Timur dan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan para pemangku kebijakan.

Kata kunci: *indeks desa membangun, pembangunan dan strategi bertahan hidup, masyarakat pulau kecil terluar, kesetaraan dalam pembangunan, Indonesia Timur*

DDC: 307.2**Inayah Hidayati, Ade Latifa, Bayu Setiawan, dan Meirina Ayumi Malamassam****KEPUTUSAN MIGRASI PEKERJA MUDA KE KOTA SORONG, PAPUA BARAT****ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan migrasi pekerja muda ke Kota Sorong. Secara umum, penelitian ini akan membahas proses pengambilan keputusan untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi migran, khususnya yang berpendidikan tinggi, bermigrasi ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Para migran berpendidikan tinggi tersebut kemungkinan memiliki berbagai pertimbangan ketika memilih Kota Sorong sebagai daerah tujuan migrasi mereka. Data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif dari wawancara dan didukung oleh kajian pustaka. Panduan disusun untuk memfasilitasi wawancara dan menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku migrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya memahami migrasi tidak sekedar sebagai suatu proses linear hanya untuk kepentingan ekonomi, namun faktor-faktor non-ekonomi juga berpengaruh dalam pembuatan keputusan migrasi.

***Kata kunci:** migrasi internal, tenaga kerja migran, proses pengambilan keputusan*

DDC: 307.2**Hatib Abdul Kadir****MIGRAN SEBAGAI ASPEK PENTING YANG MENGANCAM ORANG LOKAL PAPUA****ABSTRAK**

Riset ini mengeksplor migrasi internal orang Indonesia ke Papua. Migrasi internal tersebut dalam dua bentuk. Pertama migrasi yang diinisiasi oleh pemerintah melalui transmigrasi, dan kedua migrasi sukarela dengan keinginan dari migran itu sendiri. Implikasi dari migrasi secara massif dan berkelanjutan ini adalah perubahan demografi secara signifikan di Papua. Orang lokal Papua menjadi minoritas baik secara jumlah dan akses mereka di ekonomi. Riset ini dilakukan di Sorong Raya, meliputi Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Dua wilayah ini secara signifikan menunjukkan dominasi migrasi di bidang ekonomi dan meminggirkan orang lokal Papua. Riset ini juga melihat response orang Papua terhadap dominasi migran tersebut.

***Kata kunci:** migrasi, dominasi, ancaman, orang lokal Papua*

DDC: 323.1**Ode Jamal dan Yan Dirk Wabiser****KONTROVERSI REALISASI KURSI AFIRMASI ANGGOTA LEGISLATIF DALAM OTONOMI KHUSUS PAPUA****ABSTRAK**

Munculnya muatan afirmasi dalam UU Otsus Papua merupakan suatu perjuangan panjang yang salah satunya dilatar-belakangi oleh rendahnya perwakilan politik dalam rangka kepentingan Orang Asli Papua (OAP). Kondisi ini pun, mendapat perhatian tim asistensi perancang UU Otsus Papua, yang kemudian munculnya pokok pikiran kuota afirmasi $\frac{1}{4}$ (satu perempat) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) bagi orang asli Papua. Dalam realisasinya, kuota tambahan anggota DPRP tersebut menemui jalan panjang dan kontroversi antara pihak pemerintah, kelompok masyarakat, dan elite politik. Tujuan dari tulisan ini adalah 1) untuk mengetahui latar belakang munculnya kuota tambahan afirmasi $\frac{1}{4}$ (satu perempat) anggota DPRP bagi orang asli Papua; dan -2) untuk mengetahui dinamika kontroversi isu kuota tambahan afirmasi $\frac{1}{4}$ (satu perempat) anggota DPRP bagi orang asli Papua pada Pemilihan Umum 2009 dan 2014. Metode penelitian terdiri dari: pendekatan kualitatif, dan studi kasus. Data primer yang digunakan diperoleh dari wawancara mendalam (in-depth interview) kepada sejumlah narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian pustaka dan dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa: 1) latar belakang munculnya kuota tambahan anggota DPRP, merupakan suatu kebijakan afirmasi dalam meningkatkan partisipasi politik orang asli Papua. Harapan dari kebijakan afirmasi ini sebagai suatu bagian penyelesaian kesenjangan dalam rekrutmen politik orang asli Papua, terutama yang terjadi di bawah rezim Orde Baru; dan -2) Penafsiran berbeda tentang muatan UU Otsus Papua, khususnya kuota kursi afirmasi baik pemerintah pusat-daerah, elite politik, dan kelompok masyarakat adalah faktor sulitnya kuota kursi afirmasi ini direalisasikan.

***Kata Kunci:** otonomi khusus, afirmasi, legislatif*

DDC: 302.2**Fitria Widiyani Roosinda dan Ariyan Alfraita****KRISIS PAPUA DALAM PERNYATAAN PEJABAT NEGARA DI MEDIA DARING: ANALISIS TEKSTUAL KONSTRUKSI WACANA KRITIS****ABSTRAK**

Beberapa waktu ini, Indonesia sedang mengalami ancaman disintegrasi bangsa di Papua yang diawali insiden di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, dan bentrok mahasiswa Papua dengan warga di Malang, merembet menjadi kerusuhan yang terjadi di kota-kota besar Papua. Sudah barang tentu gejala nasional semacam ini akan menimbulkan berbagai tanggapan dari banyak pihak, khususnya pemerintah. Penelitian ini menganalisis pernyataan-pernyataan pejabat negara di Indonesia yang berkaitan dengan krisis di Papua yang diberitakan media online. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis van Dijk yang membagi analisis wacana menjadi 3 dimensi, yang pertama dimensi teks, kedua dimensi kognisi sosial dan yang ketiga dimensi konteks/praktik sosial, hasilnya media online Indonesia hanya memiliki perbedaan di level skematik yaitu penekanan poin penting dalam isi berita.

Kata kunci: krisis Papua, media online, pejabat negara

DDC: 398.2**Adolof Ronsumbre dan Marlon Arthur Huwae****MEMITOSKAN MITOS: KONSEP LEGALITAS KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT****ABSTRAK**

Saling klaim kepemilikan atas tanah oleh sejumlah suku menjadi fenomena yang terus terjadi di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Tahun 2013 hingga tahun 2019 misalnya, terjadi 32 aksi pemalangan fasilitas publik milik pemerintah daerah dan swasta yang dibangun diatas tanah yang diklaim oleh sejumlah marga dan suku sebagai pemilik tanah yang sah. Masing-masing klen/marga dan suku mengklaim sebagai pemilik yang sah. Legalitas kepemilikan tanah oleh sejumlah suku dan klen/marga, dilakukan dengan mengkonstruksi mitos. Tulisan ini berbasis data fenomena saling klaim tiga suku tentang hak atas tanah di kawasan Bandara Udara Rendani Manokwari. Ketiga suku tersebut adalah suku Arfak, Doreri dan Mansim Mansim Borai. Untuk menguatkan klaim kepemilikan tanah, masing-masing memunculkan mitosnya sendiri. Namun, karena tidak ada kata sepakat, untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi atas penggunaan tanah, mitos baru dimunculkan, yakni hak atas tanah adat yang digunakan untuk Bandara Udara Rendani Manokwari bukan milik salah satu suku, melainkan milik ketiga suku: Arfak, Doreri, dan Mansim Borai. Hal itu berarti mitos yang pernah ada dimitoskan lagi sehingga menghasilkan mitos baru. Mitos di produksi untuk menambah fakta tentang legalitas kepemilikan hak atas tanah yang sah oleh sejumlah klen/marga dan suku.

Kata kunci: klaim kepemilikan tanah, memitoskan mitos, legalitas kepemilikan tanah, tanah adat Manokwari

Bondan Widyatmoko**RINGKASAN DISERTASI****IMPLEMENTASI SERTIFIKASI MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (ISPO): PELUANG INKLUSI BAGI PETANI SAWIT SWADAYA DI PROVINSI RIAU****ABSTRAK**

Disertasi ini meneliti mengenai kesempatan petani kelapa sawit untuk terinklusi ke dalam rantai produksi kelapa sawit yang tercipta melalui pelaksanaan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi ISPO dapat mendorong formalisasi lahan sawit petani swadaya melalui proses *enclave*. Selain itu, ISPO juga mendorong upaya pencegahan konflik melalui penataan dan penggunaan lahan dengan penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan berdasarkan bukti legal kepemilikan (SHM) dan bukti pengelolaan kebun (STDB). Hal ini mendorong proses inklusi petani sawit swadaya dengan semakin terbukanya akses permodalan, informasi serta terbangunnya sistem keterlacakan produksi sawit di Indonesia. Penelitian disertasi ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan survey rumah tangga petani, wawancara, pengamatan terlibat serta studi pustaka sebagai metode pengumpulan data.

Kata Kunci: implementasi, minyak sawit, berkelanjutan, petani sawit swadaya

Ayu Nova Lissandhi

TINJAUAN BUKU

MEMAHAMI ETNOGRAFI RUANG DAN TEMPAT

Judul Buku: *Spatializing Culture Studies: The Ethnography of Space and Place*.

Penulis: Setha Low (2017). Penerbit: Routledge, New York, USA, Hlm. xviii +263.

Eristya P. Irwanto

TINJAUAN BUKU

**DINAMIKA EKONOMI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PERTANIAN
DAN PANGAN**

Judul Buku: *The Political Economy of Agricultural and Food Policies*.

Penulis: Johan Swinnen (2018). Penerbit: Palgrave Macmillan, New York, USA, 264 hlm.



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 2, DESEMBER 2019

DDC: 330.9**Marlon Arthur Huwae dan Jaap Timmer****PUSH AND PULL DRIVEN DEVELOPMENT: A PROPOSED DEVELOPMENT PARADIGM FOR WEST PAPUA, INDONESIA****ABSTRACT**

West Papua is located in the eastern part of Indonesia with a long story of governance and development schemes under the Dutch and Indonesian governments. The notions of state segregation and tardiness were stated obviously in the development and regulations given by the Dutch and Indonesian government. The segregated circumstance was the Papuans' preferences in order to be an independent West Papua and or the high number of Melanesians in the Dutch era or becomes an integral part of the Republic of Indonesia. Furthermore, the notions of state tardiness in regard to the implementation of development model and policy are related to special autonomy and the creation of new regions under the Indonesian government and the acceleration of the decolonized development model under the Dutch government. It is, therefore, important to formulate an alternative development model and paradigm which is called Push and Pull Driven Development to develop a better West Papua.

Keywords: *paradigm, push and pull driven development, West Papua*

DDC: 307.7**Irin Oktafiani, I Wayan Suyadnya, dan Triyono****DEVELOPMENT AND ADAPTATION STRATEGY FOR OUTERMOST SMALL ISLAND COMMUNITY IN PAPUA, INDONESIA****ABSTRACT**

Over the last four decades, the development of outer islands since New Order has grown failure. This paper explains the actual condition of some outer islands in East Indonesia which made an adaptation strategy for the peoples regardless of some limited access towards development. By considering the concept proposed by Harry Jones, the development itself should consider three elements of equity to achieve which are, (1) equal life chances, (2) equal concern for people's needs, and (3) meritocracy. Data were collected by observation and in-depth interviews during Ekspedisi Nusa Manggala 2018. The study was conducted in Liki, Befondo, Fani and Brass-Fanildo Islands, in North Papua, Indonesia. We started the study by using the descriptive analysis towards Village Building Index indicators and drew on varied data sources. The result of analysis denotes that the outer islands is of great concern to be managed and the marginalized development there leads to the emergence of ideological, structural, organizational inequality driven by poor infrastructure and geographical conditions. We conclude that development equity has not happened yet in East Indonesia and still becomes a continuous work for the Indonesian government and stakeholders.

Keywords: *Village Building Index, development and adaptation strategy, outermost small island community, development equity, East Indonesia*

DDC: 307.2

Inayah Hidayati, Ade Latifa, Bayu Setiawan, dan Meirina Ayumi Malamassam

DECISION OF MIGRATION OF YOUNG WORKFORCE TO SORONG CITY, WEST PAPUA

ABSTRACT

This study aims to explain the decision-making process of migration of young workforce to Sorong City. This research will discuss the decision-making process to understand various factors that influence migrants, especially those who are highly educated, migrate to Sorong city, West Papua Province. These highly educated migrants might have various considerations when choosing Sorong City as their migration destination. The data collected is qualitative data from interviews and is supported by a literature review. Guidelines are prepared to facilitate interviews and produce a better understanding of migration behaviour. The results show that the importance of understanding migration is not just a linear process for the sake of the economy, but non-economic factors also influence migration decision making.

Keywords: internal migration, young workforce migrant, decision-making process

DDC: 307.2

Hatib Abdul Kadir

MIGRANTS AS A PROMINENT ASPECT THREATENING LOCAL PAPUANS

ABSTRACT

This research explores the internal migration of Indonesian people to Papua. Internal migration is considered in two types. First, migration which is initiated by the government through transmigration. Second, voluntary migration in which migrants have their own desire to migrate. The implication of massive and continued migration is a significant demographic change in Papua. Local people in Papua become minorities in terms of numbers and economic accesses. This research was conducted in Sorong Raya encompassing Sorong City and Sorong District. These two regions significantly denotes the dominance of economic migration which marginalizes local Papuans. This research also observed local people in Papua's responses towards migrants domination.

Keyword: migration, domination, threat, local Papuans

DDC: 323.1

Ode Jamal dan Yan Dirk Wabiser

CONTROVERSY ON REALIZATION OF LEGISLATIVE MEMBER AFFIRMATION SEATS IN SPECIAL AUTONOMY FOR PAPUA IN 2009 AND 2014 ELECTIONS

ABSTRACT

The enactment of an affirmation article in the Papuan Special Autonomy Law (UU Otsus Papua) is a long struggle that is motivated by the lack of political representation for the interest of indigenous Papuans or so-called Orang Asli Papua (OAP). This situation also received attention from the Drafting Assistance Team of UU Otsus Papua. They raised an idea to reserve the affirmative quota in which $\frac{1}{4}$ (one fourth) of the members of the Papuan People's Representative Council (DPRP) is for indigenous Papuans. During implementation, the additional quota of DPRP members becomes a controversy for the government, communities, and political elites. This article aims 1) to understand the backgrounds of $\frac{1}{4}$ (one fourth) additional affirmative quota of DPRP members for indigenous Papuans, and; 2) to find out the dynamics of the controversy over the issue of $\frac{1}{4}$ (one fourth) additional affirmative quota of DPRP members for indigenous Papuans in the 2009 and 2014 General Elections. The research methods consist of a qualitative approach and a case study. Primary data used in this research were derived from in-depth interviews. On the other hand, secondary data was obtained from a review of literature and documents. The results are: 1) the underlying reason for this additional quota for DPRP members is a part of an affirmative policy to increase the indigenous Papuans' political participation. This affirmative policy is expected to resolve the gaps in the political recruitment of indigenous Papuans, particularly under the New Order regime and; 2) the different interpretations of the Papua Special Autonomy Law's contents, especially regarding the affirmative seat quota for central and local government, political elites, and community, are the main factor that leads this affirmative seat quota difficult to be implemented.

Keywords: special autonomy, affirmation, legislative

DDC: 302.2**Fitria Widiyani Roosinda dan Ariyan Alfraita****STATE OFFICIALS' STATEMENTS N ONLINE MEDIA REGARDING
THE CRISIS OF PAPUA: CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS****ABSTRACT**

Recently, Indonesia has been threatened by the disintegration issue in Papua which initially began because of the incident happened in the Papuan students' dormitory in Surabaya and the clash between Papuan students and citizens in Malang. This situation led to the high-tense chaos that occurred in big cities in Papua and gained multifaceted perspectives and responses from many actors, particularly the government. This research analyzes the statements delivered by the state officials on online media in terms of the crisis in Papua. Utilizing critical discourse analysis, Van Dijk divides discourse analysis into 3 dimensions. First, textual dimension; second, social cognitive dimension, and; third, contextual or social practice dimension. The result is that the online media in Indonesia merely have differences in the schematic level which is the emphasis of important points in news' contents.

Keywords: crisis of Papua, online media, state officials

DDC: 398.2**Adolof Ronsumbre dan Marlon Arthur Huwae****MYTHING THE MYTHS: LEGALITY OF CUSTOMARY LAND OWNERSHIP
CONCEPT IN MANOKWARI DISTRICT, WEST PAPUA PROVINCE****ABSTRACT**

Mutual claims in land ownership by several tribes are a continuing phenomenon happening in Manokwari Regency, West Papua Province. From 2013 to 2019, for instance, there were 32 actions undertaken to block public facilities owned by local government and private companies which have been built on the land belong to certain tribes or clans. Each tribe or clan claims as to the legal owners of the land. The legality of land ownership done by several clans or tribes is undergone by constructing a myth. This paper is based on the data that shows the mutual claim phenomena of three tribes on land rights in the area of Rendani Manokwari Airport. These three tribes are Arfak, Doreri, and Mansim Mansim Borai. Each tribe generates its own myth to reinforce land ownership claims. However, when there is no agreement, a new myth is raised to obtain compensation for land use. The myth is that the rights of customary land used for the operation of the Rendani Manokwari Airport does not belong to one tribe, but those of Arfak, Doreri, and Mansim Borai. It means that the myths that have existed are resurrected to produce new myths. The myths are produced to add facts regarding the legality of land ownership for some clans and tribes.

Keywords: land ownership claims, myths, the legality of land ownership, Manokwari's customary land

Bondan Widyatmoko**DISSERTATION SUMMARY****THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL
CERTIFICATION (ISPO): OPPORTUNITY FOR INCLUSION OF PALM OIL
SMALLHOLDER IN RIAU PROVINCE****ABSTRACT**

This dissertation examines the opportunities for oil palm farmers to be included in the palm oil production chain which is created through the implementation of the Indonesian Sustainable Palm Oil Certification (ISPO). This research shows that the implementation of ISPO certification can encourage the formalization of palm oil smallholders through the enclave process. In addition, ISPO also encourages efforts to prevent conflicts through arrangement and land use based on the legal evidence of ownership or land certificate (SHM) and Cultivation Registration Receipt (STDB). This encourages the inclusion of palm oil smallholders with the increasing open access to capital and information and the establishment of a traceability system for palm oil production in Indonesia. This dissertation research is a qualitative study using farmer household surveys, interviews, participant observations, and literature studies as data collection methods.

Keyword: implementation, palm oil, sustainable, palm oil smallholder

Ayu Nova Lissandhi

TINJAUAN BUKU

MEMAHAMI ETNOGRAFI RUANG DAN TEMPAT

Judul Buku: *Spatializing Culture Studies: The Ethnography of Space and Place*.

Penulis: Setha Low (2017). Penerbit: Routledge, New York, USA, Hlm. xviii +263.

Eristya P. Irwanto

TINJAUAN BUKU

**DINAMIKA EKONOMI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PERTANIAN
DAN PANGAN**

Judul Buku: *The Political Economy of Agricultural and Food Policies*.

Penulis: Johan Swinnen (2018). Penerbit: Palgrave Macmillan, New York, USA, 264 hlm.

KEPUTUSAN MIGRASI PEKERJA MUDA KE KOTA SORONG, PAPUA BARAT

Inayah Hidayati¹, Ade Latifa², Bayu Setiawan³, dan Meirina Ayumi Malamassam⁴

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia¹²³⁴

E-mail: inayah.hidayati@lipi.go.id

ABSTRACT

This study aims to explain the decision-making process of migration of young workforce to Sorong City. This research will discuss the decision-making process to understand various factors that influence migrants, especially those who are highly educated, migrate to Sorong city, West Papua Province. These highly educated migrants might have various considerations when choosing Sorong City as their migration destination. The data collected is qualitative data from interviews and is supported by a literature review. Guidelines are prepared to facilitate interviews and produce a better understanding of migration behaviour. The results show that the importance of understanding migration is not just a linear process for the sake of the economy, but non-economic factors also influence migration decision making.

Keywords: internal migration, young workforce migrant, decision-making process

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan migrasi pekerja muda ke Kota Sorong. Secara umum, penelitian ini akan membahas proses pengambilan keputusan untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi migran, khususnya yang berpendidikan tinggi, bermigrasi ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Para migran berpendidikan tinggi tersebut kemungkinan memiliki berbagai pertimbangan ketika memilih Kota Sorong sebagai daerah tujuan migrasi mereka. Data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif dari wawancara dan didukung oleh kajian pustaka. Panduan disusun untuk memfasilitasi wawancara dan menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku migrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya memahami migrasi tidak sekedar sebagai suatu proses linear hanya untuk kepentingan ekonomi, namun faktor-faktor non-ekonomi juga berpengaruh dalam pembuatan keputusan migrasi.

Kata kunci: migrasi internal, tenaga kerja migran, proses pengambilan keputusan

PENGANTAR

Fenomena migrasi seringkali dikaitkan dengan faktor daya tarik daerah tujuan yang dianggap dapat memberikan keuntungan kepada migran. Pendapat ini didasarkan pada asumsi bahwa keputusan bermigrasi merupakan sebuah tindakan yang rasional, memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan keuntungan individu maupun komunitas. Alushi & Ordenez (2016) menjelaskan bahwa *human capital* memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku individu migran karena tingkat kualifikasi individu yang tinggi menentukan kemungkinan mendapatkan pekerjaan di daerah tujuan migrasi. Sejalan dengan teori *human capital*, faktor moneter dan non-moneter, dikatakan mempengaruhi individu dalam membuat keputusan migrasi (Balaz, Williams, dan Fifeekova, 2014; Alushi dan Ordenez, 2016).

Sebagai makhluk hidup, manusia senantiasa berhadapan dengan proses pengambilan keputusan. Keputusan yang dibuat mulai dari kegiatan apa yang akan dilakukan sampai ke mana akan melakukan kegiatan tersebut. Proses pembuatan keputusan juga sudah banyak dikaji dalam studi-studi migrasi untuk mempelajari perilaku migrasi. Berbagai model kemudian dikembangkan untuk mempelajari lebih dalam perilaku migrasi melalui pengambilan keputusan, seperti *minimalist model*, *microeconomic model*, *psycho-social & cognitive model*. Pembuatan keputusan juga digunakan sebagai metodologi untuk memahami perilaku migrasi (Alushi & Ordenez, 2016). Seorang calon migran akan memutuskan untuk meninggalkan daerahnya apabila dia memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap daerah lain dan mampu mengatasi berbagai hambatan yang

muncul dalam migrasi (Klabunde dan Willekens, 2016). Proses pengambilan keputusan bermigrasi mempertimbangkan jaringan sosial yang dimiliki, seperti migran yang memiliki kecenderungan untuk berpindah ke tempat baru yang sudah tersedia kontak dan informasi awal dari kerabat maupun teman (Diminescu, 2008; Dekker dan Engbersen, 2012; Hidayati, 2017). Semakin erat jaringan sosial yang terbentuk, akan semakin mendorong migran untuk berpindah.

Dalam tulisan Alushi dan Ordonez (2016) juga dijelaskan bahwa migrasi merupakan sebuah tindakan rasional yang dilakukan dengan tujuan memaksimalkan jumlah manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh individu atau masyarakat. Berbagai keuntungan yang diperoleh para migran akan memengaruhi status sosialnya sebagai individu hingga berdampak pada daerah tempat tinggalnya (Van Hear, 2010). Migrasi yang dilakukan oleh individu yang memiliki kualitas sumberdaya manusia (SDM) tinggi berkesempatan untuk mengakses berbagai kesempatan kerja dan berpotensi meningkatkan daya saing penduduk yang pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Tulisan ini memfokuskan pada proses pengambilan keputusan untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi migran, khususnya migran berpendidikan tinggi, bermigrasi ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Para migran berpendidikan tinggi tersebut kemungkinan memiliki berbagai pertimbangan ketika memilih Kota Sorong sebagai daerah tujuan migrasi mereka. Hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena Kota Sorong yang terletak di Provinsi Papua Barat bukan termasuk sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama di kawasan Indonesia bagian timur, seperti Makassar, Manado bahkan Jayapura. Namun demikian, data memperlihatkan proporsi migran risen berpendidikan tinggi yang masuk ke provinsi ini lebih tinggi (15,6 persen) dibandingkan dengan proporsi migran risen berpendidikan tinggi secara keseluruhan di Indonesia (12,6 persen) (BPS, 2016).

Selama ini, studi migrasi seringkali dikaitkan dengan dorongan untuk memaksimalkan ekonomi (Trachtman, 2009; Hu, 2012; Raharto, 2017). Padahal, keputusan migrasi merupakan

akumulasi atau kombinasi dari ekspektasi migran tentang kehidupan dan karirnya. Kajian ini semakin memperkuat bahwa tidak ada alasan tunggal yang dapat menjelaskan keputusan migrasi. Keputusan bermigrasi dibuat berdasarkan pertimbangan motivasi perpindahan yang kompleks. Dapat dikatakan masih terbatas kajian migrasi kelompok penduduk yang berpendidikan tinggi ke Kota Sorong. Oleh karena itu, hasil kajian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap kajian migrasi di wilayah Papua Barat.

Dalam upaya memahami faktor-faktor yang berpengaruh dalam keputusan tenaga kerja berpendidikan tinggi bermigrasi ke Kota Sorong, kajian ini difokuskan pada dua faktor, yaitu *instrumental* yang mengacu pada faktor pendorong maupun penarik migrasi di tingkat wilayah atau komunitas dan *aspirasi individu* yang merujuk pada alasan personal terkait latar belakang individu migran dalam memengaruhi keputusan bermigrasi. Dengan mengkaji kedua faktor ini, analisis diharapkan menjadi lebih komprehensif karena selain mempertimbangkan dimensi ekonomi juga melihat berbagai dimensi sosial lainnya yang dapat memengaruhi keputusan bermigrasi, seperti jaringan sosial, sejarah migrasi orang tua migran, dan latar belakang sosial-ekonomi keluarga.

Tulisan ini dibuat berdasarkan hasil kajian tim migrasi Pusat Penelitian Kependudukan, LIPI, pada tahun 2018 di Kota Sorong, Papua Barat. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dalam pengumpulan datanya.

KARAKTERISTIK SOSIAL DEMOGRAFI

Kota Sorong merupakan ‘pintu gerbang’ bagi keluar-masuknya manusia maupun komoditas barang ke berbagai kabupaten lainnya di Provinsi Papua Barat, seperti ke Sorong Selatan, Maybrat, Bintuni maupun ke Kabupaten Raja Ampat yang tersohor di mancanegara sebagai daerah pariwisata. Fasilitas pelabuhan laut dan udara juga sudah tersedia di Kota Sorong dan dapat memfasilitasi lalu lintas orang maupun barang dengan mudah. Dulu, penerbangan hanya ada dua kali saja dalam seminggu, tapi sekarang sehari bisa sampai 4-6 kali. Selain itu, dari segi keterisian

penumpang, penerbangan di Kota Sorong hanya pada Hari Raya Natal dan Idul Fitri mencapai kapasitas maksimal, tetapi saat ini hampir setiap hari penerbangan penuh dan didominasi oleh wisatawan mancanegara yang akan berwisata ke Raja Ampat. Bahkan maskapai penerbangan mulai membuka penerbangan berbiaya rendah untuk rute ke Kota Sorong sehingga semakin meningkatkan konektivitas wilayah Papua Barat. Saat ini, hotel-hotel berbintang sudah banyak dibangun di Kota Sorong untuk melayani para wisatawan. Hotel-hotel tersebut milik pemodal dari luar Papua, sehingga dikatakan kota ini lebih banyak berkembang karena peran pihak swasta.

Menurut latar belakang sejarah, Kota Sorong sudah menjadi daerah tujuan bagi pendatang dari luar Papua sejak dulu (Johansz dkk., 2017; Sukandar, 2017). Kota Sorong pertama kali didirikan oleh pemerintah kerajaan Belanda dan dikenal sebagai daerah penghasil minyak. Dalam perkembangannya kemudian, perekonomian lebih didominasi oleh sektor jasa dan hal ini mengundang lebih banyak pendatang masuk ke Kota Sorong.

Siapakah migran di kota Sorong?

Kelompok migran yang menjadi informan dalam penelitian ini, baik kelompok laki-laki maupun perempuan, berada dalam kurun usia produktif (25-34 tahun), artinya usia yang ideal untuk melakukan kegiatan yang produktif secara optimal. Sebagian besar migran, baik laki maupun perempuan, sudah berstatus menikah. Sebagian sudah menikah sebelum migrasi, tetapi ada juga yang menikah setelah tinggal di Kota Sorong. Penduduk migran yang sudah menikah, sebagian ada yang bermigrasi bersama keluarganya, namun sebagian lainnya tidak membawa keluarganya ke Kota Sorong ini. Kedatangan keluarga ada yang bersama-sama migran, namun ada juga yang menyusul setelah beberapa waktu migran menetap di Kota Sorong ini. Migran juga berasal dari latar belakang etnis yang berbeda-beda, paling banyak dari etnis Bugis dan Jawa, sebagian yang lain etnis Toraja, Ambon dan ada juga orang Flores .

Lapangan pekerjaan yang digeluti oleh migran jenisnya sangat beragam, seperti sektor perdagangan, perhotelan, perbankan, pendidikan

(perguruan tinggi) dan pemerintahan. Hanya seorang migran yang berstatus sebagai ibu rumah tangga. Sebagian besar sudah memiliki identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Dari segi pendidikan, sesuai dengan tujuan penelitian ini, kelompok migran difokuskan yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Bahkan empat orang di antaranya memiliki jenjang pendidikan sampai tingkat S 3 atau tingkat doktoral. Sebagian besar migran berasal dari keluarga yang mempunyai riwayat migrasi cukup panjang. Data kualitatif memperlihatkan cukup banyak orang tua para migran yang memiliki pengalaman bermigrasi. Umumnya mereka migrasi karena alasan pekerjaan.

Sejarah migrasi

Berdasarkan kajian terhadap sejarah migrasi, dapat diketahui bahwa sebagian besar migran di Kota Sorong, sepanjang hidupnya memiliki pengalaman bermigrasi lebih dari sekali. Sebelumnya mereka bermigrasi ke berbagai kota/kabupaten yang tersebar di berbagai provinsi, seperti DIY, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, NTT, Maluku Utara, dan Papua. Namun demikian, tidak semua migran memiliki pengalaman bermigrasi berkali-kali karena ada sebagian kecil migran yang sepanjang hidupnya baru pertama kali melakukan migrasi.

Hal menarik dari sejarah migrasi para migran di Kota Sorong, yaitu mereka belum pernah berpindah ke kota ini sebelumnya. Sebagian besar migran, baik yang sudah berkali-kali melakukan migrasi maupun yang pertama kali, baru pertama kali melakukan migrasi ke Kota Sorong. Lama tinggal di Kota Sorong bervariasi antara yang terpendek 3 bulan sampai 12 tahun. Namun demikian, mayoritas migran telah menetap di Kota Sorong ini antara 2-3 tahun. 2. 3. Keputusan bermigrasi oleh pekerja muda berpendidikan tinggi

Dalam sebuah studi ditemukan bahwa angka migrasi untuk tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan dan keahlian tinggi, lebih tinggi daripada tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah, khususnya lulusan perguruan tinggi

dibandingkan dengan lulusan sekolah menengah atau tinggi (Kennan dan Walker, 2012). Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin meningkat angka migrasinya (Malamud dan Wozniak, 2009 dalam Kennan dan Walker, 2012). Kennan dan Walker kemudian mengembangkan sebuah model untuk memperlihatkan adanya perbedaan perilaku migrasi antara individu yang berpendidikan tinggi dengan yang berpendidikan rendah, melalui sebuah model keputusan migrasi berdasarkan ukuran ekonomi (diukur dari perbedaan upah).

Dalam berbagai studi lainnya ditunjukkan bahwa keputusan migrasi tidak semata-mata didasarkan pada perhitungan ekonomi saja. Hasil studi yang dilakukan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI (Malamassam dkk., 2016) menunjukkan bahwa keputusan migrasi juga didasari oleh alasan kedekatan dengan keluarga. Demikian pula, hasil studi lainnya yang memperlihatkan bahwa faktor wilayah, ikatan kekeluargaan, serta merupakan faktor yang menentukan dalam pengambilan keputusan bermigrasi (Faggian dkk., 2007; Sage dkk., 2013).

Sehubungan dengan hal tersebut, tulisan ini selain membahas tentang proses pembuatan keputusan migrasi, juga mengkaji secara mendalam berbagai faktor yang memengaruhi keputusan para migran berpendidikan tinggi, berdasarkan faktor instrumental dan aspirasi individu. Tiga aspek dalam faktor instrumental yang dianggap memiliki peranan penting dalam keputusan migrasi, yaitu tersedianya kesempatan kerja dan ekonomi, kemampuan suatu wilayah untuk memfasilitasi lingkungan hidup bermasyarakat dan jaringan sosial. Adapun pembahasan dalam faktor aspirasi individu, meliputi tiga aspek, yaitu aktualisasi diri, pengamalan baru dan lompatan karir. Eksplorasi terhadap berbagai faktor-faktor ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih dalam mengenai dinamika migrasi tenaga kerja berpendidikan tinggi.

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERMIGRASI

Proses pembuatan keputusan

Proses pembuatan keputusan di tingkat individu (mikro) meliputi tiga aspek, yaitu pertama, membangun ekspektasi dan pengumpulan

informasi untuk membentuk ekspektasi; kedua, mengevaluasi berbagai alternatif dan proses seleksi alternatif; ketiga, terkait dengan jaringan migrasi. Pembentukan ekspektasi tergantung dari seberapa banyak informasi yang diperoleh oleh migran. Ada dua pertanyaan kunci terkait ekspektasi ini, yaitu seberapa banyak informasi yang berhasil diperoleh dan jenis informasi apa saja yang dapat diketahui oleh potensial migran. Dengan informasi yang ada, calon migran tidak hanya memiliki informasi saat ini, tetapi juga dapat memprediksi situasi yang akan datang. Klabunde dan Willekens (2016) menjelaskan bahwa dengan ekspektasi yang ada, agen atau calon migran membangun ekspektasi yang rasional dan kemudian mendasarkan perilakunya pada beragam ekspektasi tersebut. Dalam tulisannya tersebut dikatakan, di satu sisi, seorang agen memiliki informasi yang sempurna, namun di lain sisi, ada juga orang yang sama sekali tidak memiliki informasi atau informasinya terbatas. Dengan keterbatasan informasi, seorang agen mengalami kesulitan untuk membangun ekspektasi di masa yang akan datang. Ditengarai cara lain pembentukan ekspektasi adalah dengan membandingkan kehidupan individu dengan pengalamannya di masa lalu, bukan dengan kehidupan orang lain (Silveira dkk., 2006).

Hasil kajian di Kota Sorong menunjukkan bahwa tidak semua migran memiliki informasi yang mendalam tentang kesempatan kerja yang tersedia, karir/peluang kenaikan jabatan, dan pendapatan. Hanya sebagian kecil migran yang memiliki informasi yang relatif mendalam terkait kesempatan kerja, kondisi di Kota Sorong dan keberadaan keluarga sehingga memudahkan dalam membuat keputusan bermigrasi ke Kota Sorong.

Tahapan dalam pembuatan keputusan selanjutnya adalah melakukan evaluasi berbagai alternatif dan menyeleksi berbagai alternatif yang ada. Pada taraf ini, calon migran mengevaluasi berbagai alternatif yang ada untuk menentukan ke mana akan bermigrasi. Dalam proses ini, ada berbagai pertimbangan yang mendasari keputusan migran, antara lain aspirasi individu, kesempatan kerja, dan latar belakang individu. Keberadaan jaringan sosial, sebagai bagian dari modal sosial, juga merupakan proses penting dalam

pengambilan keputusan karena pengaruhnya yang cukup kuat dalam pengambilan keputusan migrasi. Hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena modal manusia seringkali digunakan untuk menjelaskan keputusan migrasi. Seringkali diasumsikan adanya hubungan yang kuat antara tingkat kualitas individu dengan kemungkinan memperoleh pekerjaan di daerah tujuan.

Faktor yang mendorong migrasi

Kesempatan kerja dan kondisi ekonomi

Apabila mengkaji keputusan informan memilih ke Kota Sorong sebagai daerah tujuan, maka ada dua faktor pendorong migrasi yang berbeda, yaitu pertama adalah migran yang memilih migrasi ke Kota Sorong melihat kesempatan kerja yang tersedia; kedua, adalah migran yang masuk ke Kota Sorong karena faktor penempatan tugas sebagai aparatur sipil negara (ASN). Terkait dengan faktor yang pertama dapat dikatakan keputusan atau ide untuk bermigrasi muncul dari inisiatif pihak migran sendiri.

Sebagian informan yang menjadi migran dalam penelitian ini menyebutkan bahwa faktor kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan di Kota Sorong menjadi alasan utama keputusan bermigrasi dibuat. Apabila dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tersedia di kota besar lainnya, seperti Makassar, informan mengungkapkan bahwa pekerjaan relatif lebih sulit diperoleh, meskipun sudah memiliki pendidikan sarjana. Kesulitan ini muncul karena adanya kecenderungan dari pemberi kerja yang lebih mengutamakan faktor pengalaman kerja dan pertemanan dalam merekrut tenaga kerja untuk konteks Kota Makassar. Hal ini berbeda dengan Kota Sorong, berdasarkan pengalaman informan ketika mencari kerja di Kota Sorong, tidak ada kendala dalam mendapatkan pekerjaan di kota tersebut. Bahkan seorang pelamar kerja dapat langsung diterima bekerja di suatu perusahaan ketika pihak perusahaan menganggap pelamar sudah sesuai dengan kriteria persyaratan yang diajukan.

“..... Kalau sudah usia 28-29 tahun sudah susah sekali dapat pekerjaan di Makassar; sementara di Sorong, lebih mudah.... Kalo di Sorong, kalo

sudah diinterview, kalo cocok, bisa langsung diterima bekerja...” (wawancara April 2018)

“.....Cari kerja di Makassar, biarpun SI itu susah sekali. Saudara saya itu sampai menganggur 4 bulan itu, tapi kalau di Sorong, saya langsung diterima. Gak tau kenapa...” (wawancara April 2018)

Selain lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan, peningkatan jenjang karir maupun kondisi ekonomi juga dianggap relatif lebih cepat di Kota Sorong dibandingkan dengan bekerja di kota besar lainnya seperti Makassar. Seperti yang dikisahkan oleh informan, berdasarkan pengalaman saudara iparnya yang sudah lebih dulu tinggal di Sorong dan bekerja di dealer mobil yang memperlihatkan adanya peningkatan pesat pada kondisi ekonomi saudara iparnya tersebut. Hal inilah yang kemudian memotivasinya untuk migrasi dan bekerja di Sorong.

“.... ipar sudah terlebih dahulu tinggal di Sorong. Dulu dia bekerja di Toyota, sekarang dia bekerja seperti saya, cuma yang dia dapat sekarang, sudah bisa beli mobil, sama rumah (di Sorong), tambah lagi pergi ke luar negeri. Jadi saya merasa iri dengan dia, kalo dia bisa berhasil seperti itu, saya juga bisa. Pikiran saya ke dia terus, kalo dia bisa maka saya juga harus bisa....” (wawancara April 2018)

“....kalo saya lihat di Sorong, jenjang karir bagus. Setahu saya waktu bekerja di Makassar, jenjang karirnya itu susah.....Karyawan-karyawan lama ada yang lama sekali terangkat. Bertahun-tahun kerja, jabatan masih itu-itu saja. Kalau saya perhatikan di Sorong ini, jenjang karir lebih cepat....” (wawancara April 2018)

Tawaran kesempatan kerja yang diterima tidak hanya dari sektor otomotif atau sektor produktif, tetapi juga dari sektor jasa lainnya seperti perguruan tinggi, perhotelan dan perbankan. Informasi mengenai kesempatan kerja ini diperoleh migran dari berbagai sumber, seperti keluarga, saudara, kerabat, teman, maupun dari media massa (surat kabar). Seperti pengalaman seorang dosen perempuan yang mengajar di Universitas Muhammadiyah Sorong (UMS), menurut penuturannya, tawaran mengajar diperoleh dari seniornya yang juga seorang dosen dan kebetulan memiliki kenalan di UMS tersebut. Pada saat menerima

tawaran kerja tersebut, awalnya dirinya tidak menanggapi secara serius, namun ternyata pihak UMS memproses penempatannya di universitas tersebut. Pada akhirnya tawaran bekerja menjadi dosen itu dijalani dengan serius, karena selain sudah adanya penerimaan dari pihak universitas, dorongan untuk memperoleh pengalaman baru di daerah lain, juga turut mendorong dirinya memutuskan bermigrasi ke Kota Sorong. Dalam perkembangannya kemudian, sementara menunggu persiapan administrasi dari pihak universitas, dia mengajar di Makassar. Setelah beberapa bulan mengajar di Makassar, informan pergi ke Sorong.

Pengalaman yang serupa juga dialami oleh informan migran yang saat ini bekerja di sektor otomotif (dealer mobil). Menurut pengalamannya, keinginannya untuk bekerja di Sorong timbul setelah melihat lowongan kerja yang ada di surat kabar. Diinformasikan bahwa tersedia lowongan kerja di bagian dealer mobil untuk Kota Sorong. Berdasarkan info tersebut kemudian dia mengirimkan lamarannya. Hal yang menarik, menurut penuturannya, baru satu minggu tinggal di Kota Sorong, dia sudah menerima tawaran bekerja dari bank swasta yang ada di Sorong. Hal ini memperlihatkan terbuka luasnya kesempatan kerja di Kota Sorong, khususnya untuk mereka berpendidikan tinggi atau pengalaman kerja.

Sebagian informan menyatakan baru pertama kali pergi ke Sorong, sehingga bayangannya mengenai kota ini berbeda jauh dari kondisi yang sebenarnya. Kebanyakan memiliki anggapan kota ini masih terbelakang dan rawan keributan. Beberapa informan kemudian mencoba mencari informasi tentang Kota Sorong dari beberapa sumber, antara lain dari internet. Seperti yang disampaikan informan setelah melihat Kota Sorong, ternyata kondisinya tidak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Diakui harus ada perubahan *'mindset'* dalam menilai Kota Sorong. Demikian kutipan wawancara dengan beberapa informan migran sebagai berikut:

“....Bayangannya sebelumnya taulah bagaimana deskripsi Papua kalau diluar kan katanya gini, primitif, gini-gini, tidak ada ini-tidak ada ini, sampai-sampai persiapan saya tu mempersiapkan lahir batin dan sampai apa ya.... haduh saya akan tinggal di Papua ini ngajarnya gimana ya gini-gini. Ternyata pas sampai sini biasa aja apalagi

dengan melihat banyak teman-teman yang dari daerah yang sama akhirnya ya lumayanlah, menyenangkan, gitu sih pak....”(wawancara April 2018)

“.....Jadi kalau saya sih semenjak di sini saya merubah paradigma, jangan melihat Sorong dari...., jangan melihat Papua Barat dari cover-nya, atas namanya saja. Lihat isinya ternyata ya ini adanya, nyaman kok....”(wawancara April 2018)

Umumnya, mereka yang memiliki kerabat atau saudara yang sudah lebih dulu tinggal di Papua, sudah memiliki pengetahuan akan Kota Sorong lebih banyak. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan besar antara yang dibayangkan dengan kenyataan yang dihadapi. Kota Sorong seperti juga umumnya kota-kota besar lainnya memiliki fasilitas perkotaan seperti adanya tempat-tempat perbelanjaan, kafe, tempat karaoke, bank, dan lembaga pendidikan. Hanya dua fasilitas umum yang belum ada di kota tersebut, yaitu bioskop dan mall, padahal keduanya merupakan hiburan bagi mereka yang tinggal di Kota Sorong. Dibandingkan dengan kota lainnya di Provinsi Papua, seperti Jayapura, sebagian besar informan menyatakan Kota Sorong meskipun lebih sepi, namun relatif lebih aman dan nyaman.

Selanjutnya, terkait dengan faktor pendorong migrasi kedua, keputusan migrasi ke Kota Sorong lebih disebabkan karena adanya penugasan dari institusi tempat bekerja migran (penempatan kerja). Pemilihan Kota Sorong dapat dikatakan bukan karena keinginan pribadi, tetapi merupakan bagian dari persetujuan yang sudah ditandatangani oleh setiap pekerja untuk siap ditempatkan di mana saja. Untuk menduduki posisi penting di suatu perusahaan atau kantor, seperti menjadi pimpinan atau direktur, menurut informan, kesempatan diberikan kepada pihak dari luar karena dianggap lebih memiliki kemampuan dan pengalaman yang lebih tinggi.

“....rata-rata untuk posisi yang lebih tinggi itu, selalu diisi dari luar. Kalau kita meskipun sudah lama menetap di sini, kecuali mempunyai prestasi yang lebih, mungkin suatu saat bisa juga dianggap. Tetapi sekarang ini bagian kepala cabang, selalu diambil dari luar....”(wawancara April 2018)

Sebagian migran yang ditempatkan di Sorong oleh kantor pusat, mengaku tidak pernah tahu akan ditempatkan di kota ini dan juga tidak punya gambaran sama sekali tentang kota tersebut. Seperti halnya dengan migran yang memilih sendiri untuk pindah ke Kota Sorong, mereka yang ditempatkan untuk kerja di Kota Sorong memiliki anggapan bahwa kota tersebut masih ‘terbelakang’. Sehingga ketika harus mempersiapkan diri ke kota tersebut, migran merasa perlu melengkapi diri dengan beragam barang-barang keperluan rumah tangga, karena khawatir di Kota Sorong tidak tersedia. Berikut kutipan wawancara dengan salah seorang migran asal Ponorogo:

“.....Pertama saya ke sini bawa autan, saya pikir nggak ada yang jual.... terus saya bawa setrika sendiri, bawa tempat handuk sendiri, semua bawa sendiri sampai kompor gas... ya bayangannya sangat terbelakang ...tapi pas sampai sini ternyata sudah sangat maju...” (wawancara April 2018)

“Creative class environmental factors”

Faktor ini mengacu kepada kemampuan suatu wilayah memfasilitasi lingkungan hidup bermasyarakat yang terbuka, beragam dan toleran terhadap berbagai perbedaan gaya hidup ataupun identitas budaya. Seperti yang pernah dikemukakan sebelumnya bahwa sebagai tenaga kerja berpendidikan tinggi, mereka memiliki pilihan yang lebih luas akan daerah tujuan migrasi. Kesempatan ekonomi bukan merupakan satu-satunya pertimbangan dalam pengambilan keputusan, namun faktor wilayah yang terbuka, juga menjadi dasar pertimbangan untuk bermigrasi.

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, sebagian informan yang menjadi migran dalam penelitian ini, memiliki latar belakang migrasi ke Papua. Sebagian dari mereka memiliki keluarga atau kerabat yang pernah tinggal di Kota Sorong dan di berbagai daerah lainnya di Provinsi Papua Barat maupun Papua. Oleh karena itu, dapat dipahami apabila sebagian migran tidak merasa asing atau sudah ‘familiar’ dengan wilayah Kota Sorong. Contohnya, pengalaman seorang informan migran yang orang tuanya lebih dulu tinggal di Kota Sorong untuk bekerja di pabrik kayu lapis. Orang tuanya ketika itu juga pernah

memiliki usaha jualan bakso dan sukses, sehingga dari hasil dagang tersebut orang tuanya pernah memiliki ruko dan investasi lainnya dengan membeli kapling-kapling tanah. Migran pada saat itu ikut dengan neneknya dan baru bergabung dengan orang tuanya ketika menempuh pendidikan lanjutan atas. Pengalaman migran lainnya yang memiliki orang tua atau kerabat yang tinggal di daerah lain di Provinsi Papua Barat ini, juga menjadi pertimbangan dalam memutuskan pindah ke Kota Sorong ini. Umumnya migran tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi di tempat baru, Hanya memakan waktu sekitar sebulan-dua bulan, mereka sudah dapat beradaptasi dengan baik.

Kehidupan masyarakat yang memiliki toleransi tinggi, juga dapat menjadi faktor pendorong bagi migran ketika memutuskan pindah ke suatu daerah. Untuk kasus Kota Sorong, informan mengungkapkan bahwa masyarakat asli Papua terkenal dengan tingkat toleransi yang tinggi terhadap pendatang. Dapat dikatakan jarang terjadi gesekan antara pendatang dengan penduduk lokal, konflik yang terjadi justru kebanyakan terjadi antar pendatang. Adanya sikap saling menghormati inilah yang juga membuat pendatang merasa nyaman hidup berdampingan dengan masyarakat lokal di Kota Sorong. Menurut informan, sikap toleransi juga tampak di dunia pendidikan, hal ini diindikasikan dengan keberadaan mahasiswa yang sebagian besar beragama Kristen di Universitas Muhamadiyah Sorong. Sikap toleransi yang tinggi di antara orang Papua ini juga dikatakan oleh narasumber yang merupakan penduduk lokal. Menurutnya, sikap toleransi yang dijunjung dalam NKRI dapat terlihat nyata di Papua. Namun demikian, di balik sikap toleransi yang tinggi terhadap pendatang, menurutnya tetap ada perasaan termarginalisasi di antara penduduk lokal dengan kedatangan para pendatang di Kota Sorong ini. Perasaan terpinggirkan ini muncul ketika melihat penduduk lokal dan pendatang datang bersama untuk melamar lowongan kerja yang ada, namun yang terjadi orang Papua tidak diterima. Meskipun hal ini diakui mengganggu, namun sejauh ini masyarakat lokal tetap terbuka dengan kedatangan para migran yang cenderung meningkat seiring dengan pembangunan di sektor jasa.

“....orang Papua itu baik Pak, paling baik, toleransinya itu paling tinggi dan saling menghormati tapi jangan sekali-sekali ganggu dia, dia tidak mengenal kita itu...” (wawancara April 2018)

“....Kalau bicara toleransi kita di sini hebat Pak, kita Muhammadiyah Pak tapi enampuluhlima persen Kristen, apa ini bukan toleransi gila-gilaan....” (wawancara April 2018)

Temuan lainnya yang menarik dari penelitian ini adalah perkembangan ekonomi suatu wilayah ternyata tidak selalu menjadi faktor pendorong migran memilih bermigrasi ke daerah tersebut. Sebagian tenaga kerja migran yang masuk ke Sorong mempertimbangkan kota tersebut sebagai daerah tujuan karena dianggap ‘belum terlalu pesat berkembang’, sehingga menjadi lebih kondusif untuk berekspresi, mengembangkan karir atau *passion*. Hal demikian membuat migran lebih tertarik untuk pergi ke Sorong daripada ke Jakarta.

“.... Saya terpancing pergi ke Sorong karena ada ipar yang pergi merantau ke Sorong. Kata ipar, Sorong kota yang belum berkembang, suasana masih bagus, dibanding kota yang sudah berkembang, itu lebih susah diolahnya. Sorong juga lebih butuh perantau yang kinerja kerjanya lebih serius....” (wawancara April 2018)

Jaringan Sosial

Ikatan dan relasi sosial juga memiliki andil dalam pembuatan keputusan bermigrasi. Melalui relasi sosial yang terbangun ini individu dapat memperoleh beragam informasi, seperti kesempatan kerja yang tersedia di daerah tujuan, akomodasi, akses transportasi dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh individu yang ingin bekerja di luar daerah. Demikian pula halnya dengan kajian di Kota Sorong ini, ketersediaan informasi akan kesempatan kerja di sini yang diperoleh dari saudara atau kerabat yang sudah lebih dulu menetap di Sorong, merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan. Keberadaan relasi sosial ini sangat berpengaruh terutama bagi kelompok migran yang masuk ke Kota Sorong karena pilihan sendiri, contohnya, pengalaman seorang migran yang mendapatkan informasi tentang peluang kerja di Kota Sorong ini dari pamannya yang bekerja sebagai kontraktor di

kota ini. Pengalaman bekerja di Sorong selain membuka wawasan yang lebih luas, juga membuka kesempatan baginya membentuk ikatan jaringan sosial dengan berbagai pihak, sehingga akses pada peluang kerja juga lebih terbuka luas.

Ikatan atau relasi sosial tidak hanya membuka informasi kesempatan kerja lebih luas, namun juga dapat memberikan informasi tentang tempat tinggal. Beberapa migran menceritakan bahwa mereka dapat memperoleh tempat tinggal di ‘kost-kost’-an karena dibantu oleh teman atau rekan kerja yang sudah lebih dulu tinggal di Kota Sorong. Keberadaan anggota keluarga, kerabat atau teman di masyarakat, dalam literatur migrasi dikatakan sebagai variabel afiliasi yang memberikan pengaruh besar dalam pembuatan keputusan migrasi di tingkat individu (De Jong & Gardner, 1981:50).

Setelah tinggal di Kota Sorong, para migran juga membangun relasi sosial, tidak saja dengan sesama pendatang, tetapi juga dengan penduduk lokal lainnya. Hal ini nampak dari pertemanan yang terbangun di lingkup kerja. Hubungan yang terjadi tidak hanya sebatas hubungan kerja, namun meluas sampai ke hubungan sosial lainnya. Hal menarik yang disampaikan migran adalah banyaknya suku yang ada di Kota Sorong ini justru membuat hubungan pertemanan semakin baik. Meskipun di antara mereka ada yang berbeda agamanya, namun hal tersebut tidak membuat mereka menjauh, tetapi sebaliknya saat hari raya Idul Fitri atau Natal tiba, mereka terbiasa saling mengunjungi. Keakraban hubungan sosial seperti ini tidak dijumpai migran di kota besar seperti Makassar. Berikut kutipan wawancara mengenai hal tersebut:

“.....Di sini banyak sekali suku-suku, enak sih untuk teman bergaul. Pada saat Natal ataupun Lebaran bisa saling mengunjungi. Beda dengan di Makassar, kalau di Makassar kan hanya Bugis, Jawa kalo di sini ada banyak suku. Hubungan antar suku di Sorong juga enak, aman. Dibandingkan dengan daerah lain di Papua, di Sorong ini masih relatif aman. Kalau di lihat dari segi Natalan, Lebaran, itu masih saling menghargai, saling mengunjungi satu sama lain. Karena di kantor saja seimbang antara yang muslim dan non muslim, jadi sudah dekat antar mereka. Beda dengan di Makassar, mayoritas didominasi oleh muslim.....” (wawancara April 2018)

Aspirasi Individu

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai aspirasi individu dalam keputusan migrasi ditelusuri melalui tiga aspek, yaitu aktualisasi diri, mendapatkan pengalaman baru, dan lompatan karir. Sebagai individu yang berpendidikan tinggi, diharapkan mampu mengisi berbagai peluang yang tersedia di daerah tujuan. Sulit membedakan pengaruh dari masing-masing aspek tersebut dalam proses pengambilan keputusan migrasi karena umumnya selain ingin mengaktualisasikan diri, keputusan bermigrasi juga diambil karena alasan ingin mendapatkan pengalaman baru atau karena melihat kesempatan karir yang lebih baik. Oleh karena itu dalam pemaparan berikut ini, tidak membedakan antar aspek tersebut dalam mengkaji aspirasi individu dalam keputusan bermigrasi.

Beberapa migran yang ditemui menceritakan bahwa keputusan memilih Kota Sorong juga didasarkan pada keinginan untuk dapat mengaktualisasikan diri, sehingga modal pendidikan yang dimiliki dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Tidak saja menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, tetapi juga dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tujuan. Hal ini yang menjadi pertimbangan sebagian informan ketika memutuskan migrasi ke Sorong, meskipun ada pilihan untuk mengajar di kota-kota besar lainnya seperti di Makassar. Menjadi dosen di Sorong lebih memberikan peluang untuk ‘bereksprei’ lebih banyak sehingga kegiatan perkuliahan menjadi lebih menarik. Mengajar di Papua juga dianggap lebih memberikan ‘tantangan’ karena dosen juga harus paham kondisi psikologis para mahasiswanya yang sebagian besar penduduk asli Papua. Namun demikian, tantangan itu tidak dilihat sebagai beban, tetapi lebih merupakan peluang untuk pengembangan diri pribadi.

Keputusan migrasi ke Kota Sorong juga diambil dengan pertimbangan adanya peluang untuk pengembangan karir secara cepat, hal ini dianggap sulit diperoleh apabila bekerja di kota-kota besar lainnya. Menurut informan, di daerah yang aspek pendidikan belum menjadi perhatian, peluang untuk meningkatkan karir justru lebih cepat. Hal ini terbukti dengan pengangkatan

para dosen dengan status dosen tetap kurang lebih tiga tahun setelah mengajar di universitas swasta tersebut. Menurut informan, promosi seperti ini belum tentu diperoleh apabila mereka mengajar di kota-kota besar lainnya. Kondisi ini yang juga membuat mereka bertahan untuk tetap menjadi dosen di Kota Sorong, meskipun ada tawaran untuk mengajar di daerah lain di Pulau Jawa. Terlebih lagi saat ini Indonesia bagian timur mendapat prioritas dari pemerintah pusat untuk dikembangkan 16 aspek pendidikannya. Hal ini semakin memperkuat keputusan mereka menjadi pendidik di Kota Sorong ini.

Hal yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh informan migran yang berkecimpung dalam sektor jasa perbankan. Menurut penuturannya, hal yang mendasari dirinya memutuskan memilih Kota Sorong ini sebagai tempat kerjanya yang baru adalah karena pertimbangan peluang untuk memperoleh promosi karir yang lebih cepat. Promosi tersebut dapat diperoleh dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun bekerja di Sorong. Seperti halnya dengan para dosen, informan beranggapan bekerja di Kota Sorong lebih ‘enak’ daripada bekerja di Jawa karena memiliki peluang yang lebih besar untuk memajukan sektor perbankan yang diasumsikan masih jauh tertinggal.

Latar belakang migran berdasarkan tahapan ‘life-course’

Proses pengambilan keputusan migrasi tenaga kerja berpendidikan tinggi dapat dikatakan kompleks. Berbagai faktor saling mempengaruhi keputusan individu untuk bermigrasi. Dalam sebuah model yang dikembangkan oleh De John dan Fawcett (dalam Alushi dan Ordonez, 2016) dijelaskan bahwa keinginan bermigrasi merupakan hasil dari sejumlah keperluan yang diharapkan oleh aktor yang bersangkutan. Ada beberapa hal di luar kesempatan ekonomi dan pasar kerja yang ditengarai dapat mempengaruhi keputusan aktor, misalnya karakteristik individu, nilai budaya dan sosial, kemampuan menghadapi risiko buruk. Oleh karena itu, untuk mendalami perilaku migrasi memperhatikan juga tahapan *life course* dengan penekanan pada tiga aspek yaitu *migration trajectories*, *professional trajectories*

dan *socio-familial trajectories*. Ketiga aspek *life course* tersebut ditengarai memiliki peran yang cukup besar dalam memengaruhi keputusan migrasi. Keinginan untuk bermigrasi dapat menjadi semakin kuat apabila individu memiliki latar belakang sejarah migrasi yang cukup panjang (sejak kecil sudah terbiasa mengikuti orang tuanya),

Latar belakang pengalaman bermigrasi sebelumnya, baik karena mengikuti penempatan orang tua di luar daerah maupun karena alasan melanjutkan pendidikan tinggi, juga memainkan andil dalam pembuatan keputusan untuk melakukan perpindahan antarwilayah. Apabila melihat pada *migration trajectories* terlihat adanya hubungan yang kuat antara kebiasaan berpindah-pindah tempat dari satu daerah ke daerah lain, baik untuk sekolah, kuliah, kerja, dengan proses pengambilan keputusan untuk bermigrasi ke Kota Sorong. Seperti yang disampaikan oleh seorang informan migran bahwa melakukan migrasi antar daerah merupakan hal yang biasa saja karena dirinya sudah terbiasa berpindah-pindah tempat semasa sekolah-kuliah. Dia hanya membutuhkan adaptasi yang tidak lama (sebulan sampai dua bulan) untuk dapat menyesuaikan diri dengan tempat tinggal maupun lokasi kerja yang baru di Kota Sorong ini.

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai *migration trajectories*, dapat dibaca kutipan wawancara mendalam April 2018 dengan dua orang migran di bawah ini:

“...jadi sebenarnya kemaren waktu S1 saya kuliah kan di Universitas Negeri Makassar kemudian saya lanjutkan di Universitas Negeri Semarang, alasannya itu atas pertimbangan bahwa kalau di sana saya lebih mampu membedakan kalau di sini atmosfernya seperti ini, kalau di Makassar seperti ini, kalau Semarang seperti ini. Karena kan orang pada berpikir kalau kuliah di Jawa itu atmosfernya lebih wah dalam hal pengembangan ilmu ketimbang masih di Makassar jadi makanya kenapa saya sampai ke Semarang....”

“....kalau Ayah saya dulu pernah penempatan PNS juga di Ternate selama tujuh tahun sama ibu juga. Tujuh tahun di sana terus pindah karena ada kerusuhan,saya kecil di sana tapi saya tidak ingat lagi. Dari Ternate pindah ke Surabaya sebentar terus ke Ponorogo lagi karena sekolah. Saya sekolah dari SD sampai SMA di Ponorogo,

karena ingin sekolah D3, pindah lagi ke Jakarta dan untuk S1 pindah ke Semarang di Untag....”.

Latar belakang migran yang juga mempunyai peran dalam keputusan untuk migrasi adalah *professional trajectories*, yang mencakup gelar akademik yang dimiliki, bidang studi, lapangan, dan status pekerjaan. Apabila melihat pengalaman para migran yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, ada indikasi kuat bahwa gelar akademik, studi, maupun pengalaman kerja, mempermudah mereka mendapatkan peluang kerja di Kota Sorong. Individu yang memiliki modal manusia kuat dapat memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang kerja. Pengalaman beberapa migran yang saat ini bekerja sebagai dosen di sebuah universitas swasta di Kota Sorong memperlihatkan bahwa keputusan bermigrasi ke Kota Sorong besar kemungkinan dipengaruhi oleh latar belakang profesi sebagai pengajar/dosen yang selama ini ditekuninya.

Namun, pengalaman migran yang lain memperlihatkan bahwa tidak selamanya kesesuaian bidang studi memegang peranan penting untuk mendapatkan tawaran kerja/ peluang kerja. Namun, pengalaman bekerja yang membuat migran mudah untuk mendapatkan peluang bekerja di Kota Sorong ini. Kutipan wawancara mendalam berikut ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena tersebut:

“.....Dulu, saya ikut mengawasi pembangunan bandara Sorong, sebelum kerja di Daihatsu, selama setahun lebih. Saya pernah juga mengawasi proyek pembangunan jalan trans Papua di Sorong Selatan, di beton jalannya. Kemudian saya mengawasi pembangunan bandara, bagian pengecoran struktur. Jadi saya loncat-loncat, jurusan sekolah mesin tapi kuliah hukum, lulus kerja di kontraktor, langsung pindah ke bagian marketing...” (wawancara April 2018)

Aspek lainnya dari latar belakang individu migran yang juga memegang peran kunci dalam mempengaruhi keputusan migrasi mencakup jenis kelamin, posisi dalam siklus hidup, dan latar belakang sosial ekonomi keluarga. Hal yang paling berpengaruh dalam keputusan migrasi adalah latar belakang sosial ekonomi keluarga, terutama keluarga yang pernah berusaha dan tinggal di Kota Sorong. Sebagian migran menceritakan

bahwa keputusannya bermigrasi didorong oleh kesuksesan orang tuanya atau kerabat ketika berusaha di Kota Sorong ini. Kesuksesan merekalah yang memberikan pengaruh yang cukup besar kepada migran untuk ikut memanfaatkan peluang kerja yang tersedia di kota Sorong ini.

“.....Adik saya yang lebih dulu ke Sorong. Sebenarnya yang memotivasi saya ke Sorong itu kakak ipar. Adik saya sudah tinggal di Sorong selama 5 tahun... ipar sudah terlebih dahulu tinggal di Sorong. Dulu dia bekerja di Toyota, sekarang dia bekerja seperti saya, Cuma yang dia dapat sekarang, sudah bisa beli mobil, sama rumah, tambah lagi pergi ke luar negeri. Jadi saya merasa iri dengan dia, kalo dia bisa berhasil seperti itu, saya juga bisa”. Pikiran saya ke dia terus, kalo dia bisa maka saya juga harus bisa.....”. (wawancara April 2018)

Tradisi merantau juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembuatan keputusan bermigrasi. Seperti pengalaman beberapa migran, keputusannya bermigrasi juga dipengaruhi oleh dorongan dari orang tuanya untuk mencari pengalaman di luar ‘kampung halaman’. Hal ini sangat ditekankan khususnya kepada anak laki-laki, bahwa mereka harus membuktikan keberhasilan dirinya dengan cara merantau. Bagi masyarakat Bugis dan beberapa masyarakat lainnya di Indonesia, seperti orang Minang, tradisi merantau ini sepertinya merupakan hal yang prinsip dalam ‘life cycle’ kehidupan mereka. Ukuran kesuksesan tidak diukur dari keberhasilan di kampung sendiri, tetapi justru di kampung orang lain. Hal inilah yang kemudian mendorong sebagian migran untuk keluar daerahnya untuk menunjukkan kepada keluarganya bahwa mereka mampu memperoleh kesuksesan di luar daerah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh dua informan migran sebagai berikut ini:

“....Ketika pindah ke Sorong, direstui oleh orang tua juga, sebagai anak laki-laki selain harus bisa merantau, anak laki-laki harus juga tahu bagaimana kampung orang lain....”(wawancara April 2018)

“....Awalnya itu pak, motivasi dari orangtua itu bahwasannya setelah saya selesai dari S2, setelah selesai S2 beliau katakan kalau mau sukses harus merantau, kalau mau jadi orang sukses harus merantau, dan prinsip orang Bugis katanya begitu. Prinsip orang bugis, tidak sukses

dikampung sediri tapi sukses dikampung orang lain. Walaupun sampai sekarang ini belum sukses ha ha ha....” (wawancara April 2018)

DISKUSI

Ada dua hal yang didiskusikan, yaitu perilaku migrasi terkait dengan pengambilan keputusan dan dampak migrasi terhadap pembangunan wilayah. Meskipun Papua Barat merupakan daerah yang berada di luar pusat pertumbuhan ekonomi utama, namun yang menarik untuk kasus Sorong ini, daerah tersebut menjadi daerah tujuan migrasi tenaga kerja berpendidikan tinggi. Mereka melihat adanya peluang untuk maju di kota ini, tidak saja dari aspek ekonomi tapi juga dari jenjang karir di institusi. Meskipun demikian, menarik untuk dikaji lebih dalam apakah perilaku migrasi tenaga kerja berpendidikan tinggi cenderung sama atau berbeda-beda dalam memutuskan untuk pindah.

Berdasarkan hasil temuan memperlihatkan bahwa beragam faktor memengaruhi proses pengambilan keputusan migrasi dan tidak mudah untuk mengisolasi sebuah faktor untuk menetapkan dasar individu membuat keputusan bermigrasi. Faktor instrumental maupun aspirasi individu, kedua-duanya membawa pengaruh yang cukup besar dalam pembuatan keputusan migrasi oleh tenaga kerja berpendidikan tinggi. Akan tetapi, apabila melihat pengaruh dari *professional trajectories* individu, maka dapat diketahui adanya perbedaan ekspektasi antara kelompok migran dengan latar belakang akademik yang dekat dengan dunia pendidikan dengan kelompok migran lainnya yang tidak memiliki latar belakang akademik maupun pengalaman dalam dunia pendidikan.

Pada kelompok pertama terlihat adanya dorongan atau ekspektasi yang kuat untuk melakukan pengembangan diri maupun mengaktualisasikan potensi diri dalam memutuskan migrasi ke Kota Sorong. Keinginan akan pengembangan diri atau aktualisasi diri tersebut lebih dominan daripada sekadar mengejar keuntungan finansial. Berdasarkan hasil wawancara mendalam juga nampak jelas bagaimana kepedulian kelompok migran tersebut dalam hal mendorong peningkatan kualitas pendidikan penduduk asli Papua. Sementara pada kelompok kedua,

keputusan melakukan perpindahan tempat tinggal ke Kota Sorong lebih karena dorongan untuk memanfaatkan ketersediaan lapangan kerja dan peluang ekonomi yang lebih baik. Kepindahan ke Kota Sorong ini juga dapat dikatakan sebagai 'batu loncatan' untuk peningkatan karir yang lebih baik di masa yang akan datang. Sebagai tenaga kerja berpendidikan tinggi, mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia. Peningkatan kehidupan ekonomi yang dialami oleh keluarga, kerabat ataupun teman juga ikut mempengaruhi keputusan mereka untuk migrasi ke Kota Sorong ini.

Perbedaan ekspektasi ini ternyata juga berdampak pada perilaku migrasinya. Pada kelompok migran pertama, kecenderungannya adalah tinggal atau menetap untuk waktu yang lebih lama di Kota Sorong karena ingin mengembangkan potensi diri seoptimal mungkin. Kasus para dosen yang mengajar di UMS memberikan gambaran yang jelas mengenai hal ini. Sebagian dosen yang merupakan migran dari berbagai daerah, mempunyai keinginan untuk mengajar di Kota Sorong sampai memasuki usia pensiun bahkan ada yang kemudian memutuskan untuk tinggal di Kota Sorong. Di antara mereka belum ada keinginan untuk melakukan perpindahan tempat dalam waktu dekat. Mereka memiliki idealisme tinggi untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan para mahasiswanya, khususnya mereka yang penduduk asli Papua.

Sementara perilaku migrasi pada kelompok migran yang kedua memperlihatkan indikasi kuat bahwa mereka memiliki kecenderungan untuk berpindah tempat atau migrasi apabila mendapatkan tawaran kedudukan/posisi yang lebih tinggi daripada yang ditekuni sekarang. Keputusan migrasi sangat bergantung pada informasi yang diperolehnya seperti probabilitas pekerjaan, penghasilan yang akan diperoleh, hingga biaya migrasi. Sebagian besar migran yang ditemui dalam penelitian ini, memiliki kecenderungan hanya menetap sementara di Kota Sorong dan berniat pindah ke kota besar lainnya apabila melihat peluang kerja yang lebih baik.

Selanjutnya, apabila melihat dampak migrasi tenaga kerja berpendidikan tinggi dalam

pembangunan wilayah maka secara umum dapat dikatakan bahwa migrasi tenaga kerja berpendidikan tinggi merupakan bagian penting yang mendorong pembangunan di Kota Sorong. Hal ini dapat terindikasi dari adanya peningkatan *employability* tenaga kerja dan optimalisasi *return of human capital*. Dalam tulisan Malamassam, dkk (2017) pernah disinggung isu *employability* tenaga kerja dan *return of human capital*. *Employability* didefinisikan sebagai kapasitas individu untuk masuk atau melakukan perpindahan dalam pasar tenaga kerja, serta kemampuan mereka untuk memanfaatkan potensi modal manusia yang dimiliki untuk mengakses pekerjaan yang bersifat berkesinambungan. *Employability* dapat dinilai dari pengetahuan dan kemampuan yang mereka miliki, atribut personal yang diperlukan dalam pasar kerja, serta konteks ekonomi dan sosial terkait dengan pasar kerja terkait (DHFETE, 2002 dalam Malamassam dkk., 2017). Adapun optimalisasi *return of human capital* dikatakan dapat berpengaruh terhadap keputusan untuk melakukan perpindahan antarwilayah. Oleh karena perpindahan antarwilayah tidak hanya melibatkan individu dengan modal manusia (*human capital*) tertentu, tetapi juga memerlukan modal finansial dalam proses perpindahan yang dilakukan dan kadang juga disertai keberadaan jaringan sosial di daerah tujuan.

Pada beberapa kasus yang ditemui tampak jelas bagaimana seorang migran dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang tinggi, tidak hanya memiliki peluang untuk menentukan penempatan dirinya di Kota Sorong, tetapi juga mendapatkan promosi kenaikan jabatan setelah dua tahun menduduki penempatan di kota ini. Selain itu, dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki dalam hal manajemen perbankan, ia juga mampu untuk mengembangkan lingkungan bisnis perbankan menjadi lebih profesional dan mendapat kepercayaan dari para klien. Wilayah kerjanya juga tidak hanya terbatas pada Sorong, atau daerah-daerah lainnya di Papua Barat, tetapi juga sampai ke kota-kota lainnya di Provinsi Papua. Kesempatan melakukan mobilitas akan menjadi semakin sering, yang artinya potensi untuk membangun jejaring sosial atau kerja lebih luas lagi. Dengan modal manusia tinggi (pengalaman kerja, pengetahuan

dan kemampuan tinggi) ditambah lagi jaringan kerja yang sudah dibangun dan dibina di berbagai daerah, kemungkinan besar mudah bagi aktor yang bersangkutan untuk memutuskan melakukan perpindahan antarwilayah memanfaatkan peluang yang lebih baik lagi.

Migran dengan tingkat pendidikan tinggi, juga memiliki perilaku yang lebih strategis dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Mereka juga lebih mampu memprediksi perkembangan Kota Sorong ini dimasa yang akan datang. Sebagian besar menganggap kota ini sebagai 'pintu gerbangnya' Papua, memiliki potensi untuk berkembang pesat dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh sebagian migran untuk mencari alternatif tambahan penghasilan. Hal ini misalnya dapat dilihat pada kasus beberapa migran yang selain bekerja di kantor juga memiliki kemampuan (modal finansial) untuk mengembangkan bisnis kuliner. Sebagian migran berpendapat bahwa menggantungkan diri hanya pada satu sumber penghasilan saja di Kota Sorong sangatlah berat, harus ada alternatif usaha lainnya yang dilakukan sebagai tambahan penghasilan. Dalam konteks Kota Sorong, bisnis kuliner dianggap sangat menguntungkan dan memiliki peluang untuk maju pesat dibandingkan bisnis lainnya.

Migrasinya tenaga kerja berpendidikan tinggi ke Kota Sorong diharapkan tidak hanya memberi kesempatan kepada kelompok pendatang dapat memanfaatkan pasar kerja secara optimal, namun keberadaan pendatang harus juga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktifitas penduduk asli Papua. Pembangunan Kota Sorong yang berfokus pada sektor jasa menyediakan peluang kerja yang sangat besar di masa yang akan datang dan kesempatan ini harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh setiap penduduk dalam usia produktif. Pemerintah Kota Sorong dapat mempersiapkan sejumlah langkah strategi memperkuat pendidikan dan akses pelatihan kerja untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing kuat.

KESIMPULAN

Hasil studi ini menunjukkan pentingnya memahami migrasi tidak sekadar sebagai suatu

proses linear hanya untuk kepentingan ekonomi karena dari penelusuran *socio-familial trajectory*, *migration trajectory* dan *professional trajectory*, memperlihatkan bahwa faktor-faktor non ekonomi juga berpengaruh dalam pembuatan keputusan migrasi. Keputusan individu untuk melakukan migrasi tidak hanya dipengaruhi oleh satu/ motivasi, tetapi beragam faktor turut memotivasi pengambilan keputusan.

Pelaku mobilitas penduduk berpendidikan tinggi memiliki pilihan yang lebih luas untuk aktualisasi diri. Sebagian tenaga kerja migran berpendidikan tinggi memandang kepindahan mereka ke Kota Sorong sebagai 'batu loncatan' untuk peningkatan karir ataupun untuk membangun jejak rekam pekerjaan yang lebih baik. Keberadaan pendatang dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan memiliki daya saing tinggi ini, diharapkan tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik dengan penduduk asli Papua. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih lanjut yang dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran internal migrasi dalam peningkatan daya saing tenaga kerja dan pembangunan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alushi, A. dan Johnattan Ordonez. (2016). *Migration and Decision-Making: The Role of Human Capital under a Rational Choice Approach*. Diakses dari <https://aperitivoaccademico.files.wordpress.com/2016/03/alushi-ordonez-migration-and-decision-making.pdf>
- Balaz, V., Williams, A.M., Fifekova, E. (2014). Migration decision making as complex choice. Eliciting decision weights under conditions of imperfect and complex information through experimental methods. *Population, Space and Place* (2014 online) DOI: 10.1002/psp.1858
- BPS. (2016). *Statistik migrasi Papua Barat: Hasil survei penduduk antar sensus 2015*. Jakarta: BPS.
- Dekker, R. dan Engbersen, G. (2012). How social media transform migrant networks and facilitate migration. Retrieved from <http://www.godfriedengbersen.com/wpcontent/uploads/Working-Paper-IMI-De>
- Diminescu, D. (2008). The connected migrant: An epistemological manifesto. *Social Science Information*, 47(4), 565-579.

- Hidayati, I. (2017). The Role Of Social Media On Migration Decision-making Processes: Case of Indonesian Student in University of Groningen. *Jurnal Studi Pemuda*, 6(1), 515-526.
- Hu, X. (2012). China's' new generation' rural-urban migrants: Migration motivation and migration patterns. *Migration Information Source*.
- Johansz, D.A., Sela, R.L., dan Tilaar, S. (2017). Perkembangan permukiman di Pulau Doom Kota Sorong. *SPASIAL*, 4(1), 91-102.
- Klabunde, A. & Willekens, F. (2016). Decision-Making in Agent-Based Models of Migration: State of the Art and Challenges. *Eur J Population* 32: 73-97. DOI 10.1007/s10680-015-9362-0
- Kennan, J dan Walker, J.R. (2012). Modeling Individual Migration Decisions. Diakses dari <https://pdfs.semanticscholar.org/def9/00d-22c47af135e1b4ac786f47e04b9cf2326.pdf>
- Malamassam, M.A., Romdiati, H., Noveria, M., dan Setiawan, B. 2016. Migrasi penduduk usia muda dan modal manusia di Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta. *Laporan Penelitian DIPA*. Jakarta: P2 Kependudukan LIPI.
- Malamassam, M.A., Latifa, A., Setiawan, B., Hidayati, I. & Romdiati, H. 2017. Optimalisasi modal manusia tenaga kerja melalui migrasi: Kasus Kota Batam. *Laporan Penelitian DIPA*. Jakarta: P2Kependudukan LIPI.
- Raharto, A. (2017). Pengambilan Keputusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Perempuan Untuk Bekerja Di Luar Negeri: Kasus Kabupaten Cilacap. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(1), 39-54.
- Sukandar, S.C. (2017). Tinggalan kolonial di Pulau Doom. *Jurnal Penelitian Arkeologi Papua dan Papua Barat*, 4(1), 29-41.
- Trachtman, J. P. (2009). The international law of economic migration: Toward the fourth freedom. Kalamazoo, MI: Upjohn Institute..
- Van Hear, N. (2010). Theories of migration and social change. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 36(10): 1531-1536.

<http://jmi.ipsk.lipi.go.id>

